

## PERAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM) DENGAN STRATEGI NAFKAH RUMAHTANGGA DESA SEKITAR HUTAN

### *The Role of Community-Based Forest Management (PHBM) to Household Livelihood Strategy in Around the Forest Area*

Yuliasih<sup>1)</sup>, Martua Sihaloho<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia  
E-mail: [yuliasih12.ipb@gmail.com](mailto:yuliasih12.ipb@gmail.com); [martua\\_shlh@apps.ipb.ac.id](mailto:martua_shlh@apps.ipb.ac.id)

#### ABSTRACT

*Community Based Forest Management is designed as a livelihood system for participating CBFM villages. This study aims to analyze the relationship between direct and indirect utilization to livelihood structures, and livelihood structures to livelihood strategies. The research method used is quantitative approach with survey method on 40 respondents and supported by qualitative approach to obtain qualitative data derived from the role of community-based forest management. Quantitative data analysis was done by Rank Spearman correlation test. Livelihood structures show the utilization of forest from PHBM agriculture sector has impact for pesanggem who has low income amount of 47 percent, for pesanggem has high and medium income amount of 35 percent. The result correlation between the direct and indirect utilization with livelihood structure there are no correlations, while the livelihood structure of the pesanggem household has a relationship to the livelihood strategy.*

**Keywords :** livelihood strategy, livelihood structures, PHBM, utilization

#### ABSTRAK

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dirancang sebagai sistem nafkah bagi desa peserta PHBM. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pemanfaatan langsung dan tidak langsung terhadap struktur nafkah, serta struktur nafkah dengan strategi nafkah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada 40 responden dan didukung pendekatan kualitatif sehingga diperoleh data kualitatif yang berasal dari peran PHBM. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan uji korelasi *Rank Spearman*. Struktur nafkah menunjukkan pemanfaatan hasil sumberdaya hutan dari sektor pertanian PHBM memiliki pengaruh untuk *pesanggem* yang bergolongan pendapatan rendah sebesar 47 persen sedangkan golongan tinggi dan sedang sebesar 35 persen. Hasil korelasi hubungan antara pemanfaatan langsung dan tidak langsung dengan struktur nafkah tidak terjadi hubungan, sedangkan struktur nafkah rumahtangga *pesanggem* memiliki hubungan terhadap strategi nafkah.

**Kata Kunci :** pemanfaatan, PHBM, strategi nafkah, struktur nafkah

#### PENDAHULUAN

Menurut Hamid *et al.* (2011) dalam Adalina *et al.* (2015) Keberadaan masyarakat sekitar hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pembangunan perekonomian masyarakat bisa dibangun melalui pemanfaatan sumberdaya salah satunya adalah hutan, hal ini bisa dijadikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya. Menurut Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sejarah terbentuk sistem PHBM dan LMDH karena adanya kegiatan yang dijalankan untuk merespon dan mengurangi terjadinya *illegal logging*. Masyarakat miskin yang berada di sekitar desa hutan menganggap hutan sebagai *common pool resources* yang berarti bahwa setiap orang berhak memiliki

akses untuk mengambil sumberdaya yang ada di wilayah tersebut.

Masyarakat desa sekitar hutan yang memiliki perekonomian yang rendah menyebabkan masyarakat melakukan penjarahan terhadap sumberdaya hutan. Sehingga penjarahan tersebut berdampak pada keadaan hutan yang menjadi gundul dan produksi hasil hutan oleh Perhutani menjadi berkurang. Dampak yang muncul tersebut menjadi alasan terbentuknya kerjasama Perhutani dan Masyarakat membentuk sistem PHBM. Masyarakat diberikan akses untuk bisa menggarap sumberdaya hutan melalui partisipasi pengelolaan, pertanian dan pengawasan terhadap sumberdaya hutan. Sistem PHBM dilakukan karena memiliki hubungan yang setara antara pihak perhutani dan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.

Menurut Purnomo (2006), PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang mengatur hubungan antara penduduk desa yang berada di sekitar hutan perhutani dengan sumberdaya hutan. PHBM dirancang untuk mengatur penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan perhutani yang diperkirakan menggunakan sumberdaya hutan sebagai basis nafkah rumahtangga.

Perum Perhutani diberi tanggung jawab dan hak pengelolaan hutan di Jawa dengan kawasan seluas 2.446.907,27 Ha yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung yang terbagi menjadi 3 divisi regional yaitu divisi regional Jawa Timur, divisi regional Jawa Tengah dan divisi regional Jawa Barat dan Banten (Perum Perhutani 2014).

KPH Ngawi merupakan salah satu KPH yang termasuk dalam wilayah kerja divisi regional Jawa Timur. Sistem PHBM yang diterapkan oleh LMDH Cipto Wono Lestari dan Perhutani diharapkan memberikan manfaat dan mengurangi penjarahan terhadap hutan. Sehingga kerjasama yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar hutan.

Sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan menjadi rumusan masalah dalam meneliti (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam LMDH Cipto Wono Lestari, Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana hubungan pemanfaatan langsung dan tidak langsung sumberdaya hutan terhadap struktur nafkah rumahtangga? (3) Bagaimana hubungan struktur

nafkah rumahtangga terhadap strategi nafkah rumahtangga didalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat?

## **PENDEKATAN TEORITIS**

### **Perhutanan Sosial**

Kartasubrata (1986) memandang bahwa Perhutanan Sosial, Kehutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan sebagai padanan kata dengan istilah *social forestry*. Istilah Perhutanan Sosial digunakan pertama kali dalam penyelenggaraan program oleh Perum Perhutani di Jawa pada tahun 1986.

Perhutanan Sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (sebagai unsur sosial) yang dapat dilakukan dimana saja, dilahan milik pribadi, umum atau kawasan hutan yang diijinkan. Menurut CIFOR (2003), perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, tujuan produksi yang lestari. Menurut CIFOR (2003) belum ada istilah yang disepakati bersama dan diterima secara luas. Namun semakin meningkat kesamaan pandangan dan keinginan untuk menegaskan prinsip-prinsip tujuan dan cara pencapaiannya bukan pada namanya.

Perhutanan sosial menurut Arifandy dan Sihalo (2015) adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan dimana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan sosial juga sudah dikembangkan secara tradisional diberbagai daerah seperti *Repong Damar* di Sumatra, *simpunk* di Kalimantan, *Kane* atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya.

### **Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)**

Berdasarkan keputusan direksi PT Perhutani No 682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan dalam rangka

Sosial *Forestry* memandang masyarakat setempat sebagai masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

Menurut Cifor (2007) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan akomodatif menuju masyarakat desa hutan mandiri dan hutan lestari.

Menurut Purnomo (2006) PHBM lahir pada tahun 2001 sebagai penyempurnaan program kehutanan sosial dan PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan) dan memiliki slogan PHBM "Hutan Lestari, Masyarakat sejahtera". Avila dan Suyadi (2015) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program dari Perum Perhutani untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Keberhasilan program PHBM di Perum Perhutani perlu ditunjang dengan adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bersedia memelihara kelestarian hutan serta menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani.

Menurut Purnomo (2006) PHBM mengatur luas lahan yang dapat diakses masyarakat, cara pengelolaan, cara bagi hasil, oleh karena itu PHBM merupakan kelembagaan yang membuka peluang akses sumberdaya hutan pada masyarakat di sekitar hutan.

### Akses Masyarakat

Menurut Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu, termasuk diantaranya obyek material, perorangan, institusi, dan simbol. Dengan menfokuskan pada kemampuan dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti.

Sumberdaya memiliki potensi untuk menimbulkan konflik. Untuk menghindarinya maka dibutuhkan suatu batasan yang dapat mengaturnya atau pengelolaan yang tepat bagi sumberdaya tersebut. Menurut Deni (2014) berdasarkan analisa ekonomi-politik dalam konsep menjadi nyata ketika

memisahkannya dengan tindakan sosial ke dalam pengendalian akses dan mempertahankan akses.

Konsep akses sumberdaya ini dimaksudkan adalah untuk memfasilitasi aktor yang terlibat dan memiliki kepentingan serta memperoleh manfaat dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan Perhutani dan Masyarakat.

Sistem PHBM selain ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yaitu untuk pelestarian jangka panjang hutan. Oleh karena itu, Pemanfaatan hutan sering dilakukan masyarakat dapat berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Menurut Purnamasari *et al.* (2005), pemanfaatan hutan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat secara langsung dalam bentuk material (*tangible*) semata, seperti bambu, kayu, minyak, getah, tanah dan sebagainya.
2. Manfaat secara tidak langsung seperti pemanfaatan hutan dalam bentuk *immaterial* atau pemanfaatan jasa lingkungan bisa dalam bentuk wisata alam, pelestarian lingkungan yang mengacu pada prinsip ekologi yang dapat dijadikan alternatif untuk mendukung pembangunan negara jangka panjang.

### Struktur Nafkah dan Strategi Nafkah

Dharmawan (2007) mengemukakan bahwa dalam sosiologi nafkah, pengertian strategi nafkah lebih mengarah pada pengertian *livelihood strategy* (strategi penghidupan) daripada *means of living strategy* (strategi bertahan hidup). Strategi nafkah adalah taktik dan aksi yang dibangun oleh individu ataupun kelompok dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka dengan tetap memperhatikan eksistensi infrastruktur sosial, struktur sosial dan sistem nilai budaya yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu upaya atau teknik rumahtangga dalam melakukan pilihan mata pencaharian dengan sumberdaya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga.

Chamber dan Conway (1991) dalam Purnomo (2006) menunjukkan definisi pola nafkah sebagai akses yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Akses menunjukkan aturan dan norma sosial yang menentukan perbedaan kemampuan manusia untuk memiliki, mengendalikan dalam artian menggunakan sumberdaya seperti lahan dan kepemilikan umum untuk kepentingan sendiri.

Menurut Masithoh (2005) dalam Niswah (2011), sumber nafkah adalah berbagai sumberdaya yang dapat digunakan oleh individu maupun keseluruhan anggota rumahtangga petani untuk melaksanakan strategi nafkah guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan subsisten ataupun dalam rangka meningkatkan kualitas hidup suatu rumahtangga petani.

Menurut Ellis (2000) dalam Fridayanti (2013) terdapat tiga klasifikasi sumber nafkah (*Income source*) atau disebut struktur nafkah yaitu

- a. Sektor pendapatan *on farm*: sektor yang mengacu pada pendapatan yang berasal dari tanah pertanian milik sendiri, baik yang diusahakan oleh pemilik tanah maupun diakses melalui sewa menyewa atau bagi hasil
- b. Sektor pendapatan *off-farm*: sektor yang mengacu pada pendapatan di luar pertanian yang dapat berarti penghasilan yang diperoleh berasal dari upah tenaga kerja, sistem bagi hasil, kontrak upah tenaga kerja non upah, dan masih dalam lingkup sektor pertanian.
- c. Sektor pendapatan *non-farm*: sektor yang mengacu pada pendapatan yang bukan berasal dari pertanian, seperti usaha toko, pedagang, pendapatan gaji pensiun, pendapatan dari usaha pribadi.

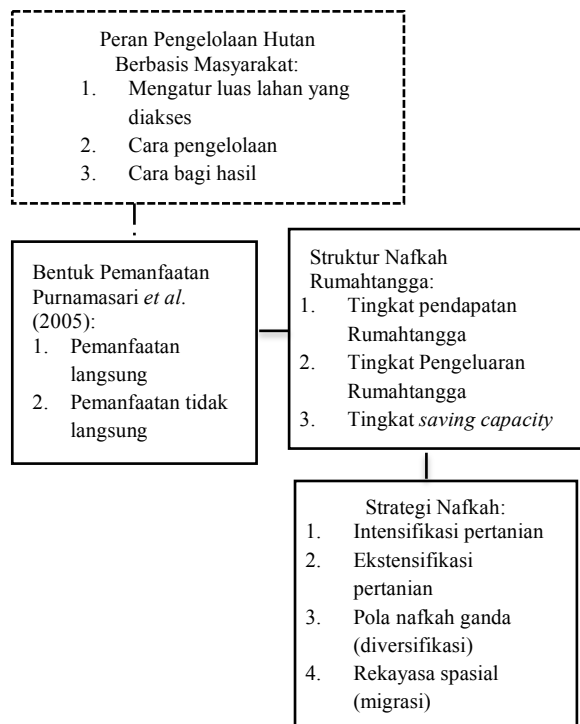
Merujuk pada Scoones (1998) dalam Turasih (2011), terdapat tiga klasifikasi strategi nafkah (*livelihood strategy*) yang mungkin dilakukan oleh rumahtangga petani, yaitu:

- a. Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi).
- b. Pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerja selain pertanian dan memperoleh pendapatan.
- c. Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara

permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan.

### Kerangka Pemikiran

Pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan salah satunya dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proposional. Penetapan kawasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan sekaligus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di wilayah sekitar hutan. Oleh karena itu suatu sumberdaya perlu dikelola dan dikendalikan. Pengendalian sumberdaya mengarah pada pemeriksaan dan pengawasan fungsi, atau kekuatan yang mengatur tindakan bebas atau kuasa dalam menjaga sebagian sumberdaya yang memiliki akses terbuka bagi dirinya. Berdasarkan pengelolaan tersebut maka perlu dilihat seberapa besar manfaat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh masyarakat dalam sumberdaya hutan dalam studi kasus Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM).



Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

Selain itu pemanfaatan yang dilakukan bisa dilihat dari struktur nafkah yang dimiliki masyarakat dari pertanian maupun non pertanian yang berhubungan dengan penerapan strategi nafkah rumahtangga. Merujuk pada Scoones (1998) dalam Turasih (2011), terdapat tiga klasifikasi strategi nafkah (livelihood strategy) yang mungkin dilakukan oleh rumahtangga petani, yaitu: (1) Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian (2) Pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) (3) Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya akan memunculkan adanya penggunaan dan pengelolaan sumberdaya hutan sebagai basis nafkah rumahtangga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di lapang. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu dengan memilih responden secara acak dari populasi kerangka sampling dengan mengukurnya menggunakan kuesioner. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk mendukung data kuantitatif. Data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, tabulasi silang, dan deskriptif data yang telah diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada informan menggunakan panduan wawancara dan teknik observasi.

Penelitian dilakukan di Desa Gandong yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Desa Gandong termasuk ke dalam wilayah hutan kemasyarakatan mitra antara perum perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cipto Wono Lestari, dengan alasan: pengelolaan dan kemitraan yang tergabung antara perhutani dan LMDH terjalin dengan baik, adanya pemanfaatan bidang pertanian yang dikelola dengan baik, masyarakat mengandalkan nafkah pertanian, LMDH Cipto Wono Lestari pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Ke 5 mengenai usaha

kripik yang diciptakan, selain itu LMDH ini sudah berusia 12 tahun.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer didapatkan melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner merupakan data dan informasi yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dan data skunder diperoleh dari kantor pemerintah desa, Perum Perhutani, dan sumber lainnya seperti buku, internet, jurnal-jurnal penelitian, skripsi, tesis dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Unit analisis penelitian ini adalah rumahtangga yang menjadi anggota LMDH Cipto Wono Lestari. Populasi dari penelitian ini adalah anggota LMDH yang berada dalam pangkuan LMDH Cipto Wono Lestari Desa Gandong yang berada di 4 dusun yang berjumlah 325 anggota rumahtangga. Jumlah responden yang diambil adalah 40 responden. Teknik penarikan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) dengan bantuan *microsoft excel*. Menurut Mantra *et al* (2012), sampel probabilitas mengandung pengertian bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak dibatasi dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) untuk memperoleh informasi tambahan terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat terhadap strategi nafkah maka digunakan teknik bola salju (*snowball sampling*).

Pengolahan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan *statistical for social science (SPSS) 16.0 for windows*. Pengujian variabel diuji dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* untuk melihat hubungan yang nyata diantara variabel dengan data berbentuk ordinal. Nilai korelasi tersebut ini memiliki arti. Korelasi positif akan menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel yang diuji. Sedangkan korelasi negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dari variabel yang diuji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Kategori umur responden dalam penelitian ini sebanyak 21 dengan persentase 52,5% merupakan responden yang memiliki usia dewasa pertengahan 31-54 tahun dan sebanyak 19 responden dengan

persentase 47,5% merupakan responden yang memiliki usia tua yaitu >55 tahun.

Kategori pendidikan responden *pesanggem* Desa Gandong yang terbanyak memiliki pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar yaitu 52,5%. Responden yang merupakan lulusan SMP sebesar 7,5%, sedangkan responden yang berpendidikan hingga lulus SMA sebesar 10%, sisanya merupakan responden yang tidak tamat SD yaitu sebanyak 30%.

Kategori jumlah anggota keluarga Rumahtangga yang memiliki kategori anggota keluarga sedikit berjumlah 19 rumahtangga dengan persentase 47%, rumahtangga yang memiliki kategori anggota keluarga sedang berjumlah 20 rumahtangga dengan persentase 50%, sedangkan rumahtangga yang memiliki anggota keluarga banyak berjumlah 1 rumahtangga dengan persentase 3%.

### **Karakteristik Pertanian Desa Gandong**

Sistem dan Orientasi Pertanian oleh rumahtangga desa Gandong adalah jenis pertanian sawah dan hutan. Hal ini dikarenakan lokasi desa yang memiliki lahan kering dan tandus serta lokasi desa yang lebih tinggi dari pada sistem irigasi, sehingga sistem pengaliran irigasi tidak bisa berjalan untuk wilayah desa gandong sebagai pengairan pertanian. Masyarakat lebih mengandalkan sistem tadah hujan untuk pengairan sistem pertanian.

Tanaman Utama yang ditanam Masyarakat Gandong jenis tanaman palawija. Komoditas tersebut diantaranya jagung, singkong, kacang. Komoditas utama yang dipilih untuk ditanam masyarakat adalah komoditas jagung. Mayoritas masyarakat desa Gandong menanam jagung pada lahan hutan yang berada dibawah tegakan pohon jati. Komoditas jagung hanya bisa menghasilkan maksimal dua kali panen dalam satu tahun.

Sistem pengairan pertanian Desa Gandong didasarkan pada kondisi lahan pertanian warga desa Gandong berada di kawasan lahan kering atau lebih tinggi dari sistem irigasi menyebabkan sistem pengairan yang dilakukan adalah sistem tadah hujan. Sistem tadah hujan merupakan sistem pengairan yang mengandalkan curah hujan sebagai sumber pengairan. Hal ini biasanya lahan hanya mampu menghasilkan pada musim hujan.

### **Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Desa Gandong.**

Pengaturan luas lahan yang bisa diakses *pesanggem* berdasarkan pada petak tertentu, yaitu petak LMDH

Cipto Wono Lestari adalah Petak 43, 44, 49, 50 dan 56. Petak tersebut memiliki anak petak yang berjumlah 47 anak petak. Proses pengaturan lahan yang dilakukan pihak perhutani dengan masyarakat bisa dirincikan sebagai berikut:

1. Perhutani memastikan wilayah tersebut sedang digarap atau tidak.
2. Pengukuran yang dilakukan pihak perhutani bersama masyarakat.
3. Jika pengukuran sudah selesai dilakukan, kemudian dicarikan juga lokasi yang memiliki luas wilayah yang sama kemudian dipasang patok atau pal batas untuk mencari tengah dari lahan tersebut.
4. Ketua lembaga bersama pihak perhutani melakukan diskusi mengenai petak yang bisa ditanami, kemudian ditentukan anggota yang bisa dan mau menanam di lahan tersebut. jika anggota LMDH tidak menyanggupi penanaman tersebut, maka bisa ditawarkan kepada anggota LMDH dari RPH lainnya.
5. Jumlah penggarap sudah diketahui maka akan dibagi berdasarkan jumlah *pesanggem* yang menginginkan tersebut dengan pembagian secara rata.

### **Cara Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM) LMDH Cipto Wono Lestari**

Kerjasama yang dilakukan didasari sebuah draft perjanjian. Draft perjanjian kerjasama pun dilakukan antara pihak Perhutani dan LMDH. Draft perjanjian tersebut berisi bentuk tanaman yang ditanam, keikutsertaan anggota menanam, keikutsertaan mengawasi hutan. Kerjasama yang dilakukan Perhutani dan LMDH dalam bentuk pertanian. KRPH akan memberitahu kepada Mandor tanaman apa saja yang bisa ditanam kemudian akan langsung dikoordinasikan dengan ketua lembaga.

#### **1. Bagi Hasil**

Kesepakatan dibuat antara pihak lembaga dan pihak perhutani dibagi menjadi dua sistem *sharing* yaitu *sharing* palawija dan *sharing* produksi. *Sharing* palawija dilakukan dengan menarik 10% dari penghasilan tanaman yang sudah ditanam masyarakat pada lahan perhutani. *Sharing* produksi yang dilakukan apabila lahan yang ditanami pohon

jati yang tegakannya sudah tinggi dan siap dipanen. Sistem *sharing* ini dilakukan dengan lembaga bukan pada perorangan.

Perjanjian lembaga dengan pihak Perhutani dimulai dari masa 0 tanam. Maka penjarangan pertama 100% diberikan kepada lembaga. Penjarangan kedua diberikan kepada lembaga juga 100% kepada lembaga. Penjarangan ketiga lembaga diberikan 25% hasil panen dengan syarat kayu hasil penjarangan terakhir masih utuh, setelah penjarangan ketiga akan dilakukan sensus pohon. Tujuan dari sensus pohon ini adalah menghitung jumlah pohon yang masih utuh. Kemudian menentukan jumlah *sharing* yang akan diterima oleh lembaga pada saat panen selanjutnya.

## 2. Pemanfaatan Hutan secara Langsung

Pemanfaatan lahan yang dilakukan dengan kerjasama lahan dan menanam komoditas pertanian. Oleh karena itu masyarakat menanaminya dengan tanaman pertanian yaitu komoditas jagung. Berhubung hutan yang dikelola merupakan hutan jati dan diharuskan minim penjarahan masyarakat hanya bisa memanfaatkan yaitu lahan kerjasama dengan perhutani dan hasil kayu pada saat musim penebangan dengan cara meminta langsung kepada pihak perhutani. Kerjasama yang dilakukan lahan perhutani penanaman tanaman pertanian dibawah tegakan dan melakukan pengawasan jika terjadi penebangan liar. Lahan kerjasama inilah yang menjadi salah satu benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh rumahtangga anggota LMDH.

## 3. Pemanfaatan Hutan secara Tidak Langsung

Sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) yang dilakukan anggota LMDH dan Perhutani memberikan manfaat kepada hutan dengan berkurangnya jumlah penjarahan yang terjadi pada hutan, hal tersebut bisa dirasakan pada saat perhutani melakukan panen produksi hasil hutan, pihak perhutani masih bisa menikmati hasil hutan. karena hutan kerjasama dengan LMDH Cipto Wono Lestari ini merupakan salah satu hutan yang bisa produksi atau panen khususnya diwilayah kedawak selatan. Pengelolaan hutan yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara masyarakat dan perhutani menurut *pesanggem* memberikan manfaat berkurangnya penjarahan dan hutan jati tetap lestari dibandingkan hutan-hutan yang berada di desa lainnya.

Menurut *pesanggem* juga dikatakan bahwa dengan adanya kerjasama dengan perhutani lahan tidak

menjadi gundul dan hutan semakin lestari. Bahkan untuk kejadian bencana tidak pernah terjadi pada hutan yang mereka garap, seperti kejadian bencana kebakaran sudah tidak pernah terjadi. Kebakaran seringnya terjadi pada musim kemarau hal ini juga dikarenakan ulah manusia yang sengaja membakar daun-daun kering. Bahkan untuk bencana longsor juga tidak pernah terjadi.

## Struktur Nafkah Masyarakat Desa Gandong

Struktur nsfkah masyarakat Desa Gandong terdiri dari sektor pertanian dan non pertanian. Pembagian pendapatan yang diperoleh dari usaha tani ini hanya dibagi menjadi 3 penghasilan yaitu hasil produksi padi, hasil produksi jagung (PHBM), produksi pohon pisang. Sedangkan sektor non pertanian.

Rata-rata pendapatan masyarakat yang tergolong pada pendapatan tinggi adalah pendapatan yang diperoleh dari bekerja sebagai PNS, warung, TKI, dan bekerja di luar desa seperti bekerja di Batam dan Lampung. Sedangkan untuk golongan sedang pendapatan diperoleh dari sektor seperti warung, menjadi ahli bekam, pengepul jagung, jual kerupuk nila, tukang kayu, penjaga gereja, dan menjadi kuli bangunan. Untuk golongan rendah pendapatan diperoleh dari sektor seperti menjadi kuli angkut, jual kompos, warung, menganyam tas, bekerja untuk orang lain.

Tabel 1 Persentase pendapatan responden per tahun dari sektor pertanian pada setiap golongan pendapatan menurut sumber pertanian tahun 2017

Sumber pendapatan	Persentase pendapatan rumahtangga/tahun (%)		
	Petani golongan tinggi	Petani golongan sedang	Petani golongan rendah
Pendapatan padi	31	56	35
Pendapatan palawija (PHBM)	62	44	61
Pendapatan pisang	7	0	4
Total	100	100	100

Pendapatan yang diperoleh rumahtangga menunjukkan struktur nafkah dari rumahtangga tersebut. Struktur nafkah rumahtangga tersebut terdiri dari sektor pertanian PHBM, pertanian Non PHBM dan Non pertanian. Ketiga sektor tersebut yang diperoleh setiap golongan memiliki kontribusi

struktur nafkah yang berbeda-beda dalam rumahtangga dengan ditunjukkannya persentase yang berbeda.

Tabel 2 Persentase rata-rata pendapatan responden per tahun dari sektor non-pertanian pada setiap golongan pendapatan menurut sumberdaya pada tahun 2017

Sumber pendapatan	Persentase pendapatan rumahtangga/tahun (%)		
	Petani golongan tinggi	Petani golongan sedang	Petani golongan rendah
Kuli angkut	0	0	12,5
Jual kompos	0	0	12,5
PNS	20	0	0
Warung	20	11	12,5
Ahli Bekam	0	11	0
Pengepul			
Jagung	0	11	0
Jual kerupuk			
Nilai	0	11	0
Tukang kayu	0	22,5	0
Penjaga gereja	0	11	0
Menganyam tas	0	0	50
TKI	20	0	0
bekerja untuk orang lain	0	0	12,5
Tukang Kebun di Lampung	20	0	0
Bekerja di Batam	20	0	0
Kuli Bangunan	0	22,5	0
Total	100	100	100

Sektor pertanian baik PHBM maupun Non PHBM tidak selalu bisa memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa pesanggem yang merasakan sedikitnya luas lahan. Ditambah dengan kebutuhan pupuk pada saat proses penanaman hingga perawatan. Selain itu jika terjadi wabah penyakit pada jagung yang menyebabkan jagung tidak bisa tumbuh dengan baik. Hal ini seperti beberapa bulan yang terjadi adalah penyakit puthan yang dialami jagung yang berakibat pada gagal panen. Beberapa alasan di atas menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pertanian yang tidak mencukupi. Ditambah lagi kebutuhan sehari-

hari mulai dari kebutuhan anak hingga kebutuhan keluarga yang semakin meningkat harganya. Rumahtangga harus mulai mengatur pendapatan yang sudah diperoleh. Selain alasan tersebut menurunnya minat pemuda terhadap pertanian mengakibatkan anggota keluarga memilih untuk memperoleh pendapatan melalui sektor non pertanian.

Tabel 3 Persentase kontribusi sumber pendapatan pertanian PHBM, non PHBM dan non-pertanian terhadap rata-rata pendapatan responden per tahun pada setiap golongan pendapatan tahun 2017

Sumber pendapatan	Rata-rata pendapatan rumahtangga PHBM dan Non PHBM/tahun (%)		
	Petani golongan tinggi	Petani golongan sedang	Petani golongan rendah
Pertanian (PHBM)	35	35	47
Pertanian (Non PHBM)	43	44	30
Non pertanian	22	21	23
Total	100	100	100

### Pengeluaran Rumahtangga

Jenis pengeluaran yang dikeluarkan rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk keperluan permodalan pertanian, kebutuhan dapur, listrik, pendidikan, transportasi untuk terpenuhinya keperluan rumahtangga.

Tabel 4 Persentase pengeluaran responden per tahun pada setiap golongan pendapatan menurut sumber pertanian tahun 2017

Sumber pengeluaran	Persentase rata-rata pengeluaran rumahtangga/tahun (Rp)		
	Petani golongan tinggi	Petani golongan sedang	Petani golongan rendah
Konsumsi	28	24	33,5
Listrik	24	24	33,5
Pendidikan	14	19	6
Transportasi	24	23	21
Air HIPPAM	10	10	6
Total	100	100	100

### Saving Capacity

*Saving capacity* merupakan kemampuan rumahtangga untuk menyetor uang yang diperoleh



dari pendapatan total dan dikurangi pengeluaran untuk ditabung. Nilai dari kemampuan menabung ini diibedakan menjadi dua yaitu nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif yang berarti rumahtangga bisa menabung. Sedangkan nilai negatif berarti rumahtangga tidak mampu menabung.

Tabel 5 Jumlah dan persentase *saving capacity* rumahtangga tahun 2017

<i>Saving capacity</i>	Tabel frekuensi	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
Nilai negatif (tidak mampu)	26	65
Nilai positif (mampu)	14	35
Total	40	100

**Penerapan Ragam Strategi Nafkah**

**1. Intensifikasi Pertanian**

*Pesanggem* 100 persen melakukan intensifikasi pertanian. Hal tersebut dilakukan mereka dengan menambah tenaga kerja dan waktu untuk bekerja di lahan hutan maupun di sawah. Walaupun jika ada anggota keluarga yang ikut membantu sebagai tenaga kerja. Maka rumahtangga tersebut harus menambah waktu untuk bekerja di lahan hutan. Sedangkan jika waktu yang dimiliki rumahtangga kecil maka rumahtangga tersebut akan menambah tenaga kerja dari luar.

**2. Ekstensifikasi Pertanian**

Lahan hutan yang *pesanggem* garap merupakan lahan perhutani yang sudah dikerjasamakan melalui sistem PHBM dengan LMDH Cipto Wono Lestari. Sehingga masyarakat hanya mampu menggarap lahan yang sudah dibagikan kepada mereka. Jika ada pembukaan lahan kembali kemungkinan *pesanggem* bisa menambah lahan untuk digarap. Kegiatan perluasan lahan yang dilakukan *pesanggem* melalui pembelian lahan. Memanfaatkan lahan warisan dan melakukan peminjaman dan penyewaan lahan.

**3. Pola Nafkah Ganda**

Lahan hutan yang para *pesanggem* garap terkadang kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil jagung yang dijual terkadang juga tidak memberikan hasil maksimal apalagi jika tanaman diserang oleh penyakit. Sehingga hal ini menjadikan beberapa kepala rumahtangga melakukan diversifikasi

pekerjaan dengan menambah kerjaan lainnya. seperti beberapa *pesanggem* yang menjadi kuli angkut, ahli bekam, berjualan di warung dan menjadi tukang kayu. Diversifikasi pendapatan yang dilakukan mereka dari hal-hal kecil seperti menganyam tas, wirausaha hingga sebagai pekerja di luar jawa.

**4. Rekayasa Spasial**

Kegiatan yang dilakukan rumahtangga apabila diversifikasi nafkah yang dilakukan didalam desa tidak mencukupi atau diversifikasi nafkah yang ada didesa tidak ada dan memilih merantau untuk mendapatkan pendapatan yang lebih maksimal. Migrasi yang dilakukan rumahtangga sekitar hutan desa Gandong bervariasi. Ada yang bekerja di luar untuk mencari pasien hal ini seperti yang dilakukan oleh ahli bekam yang dilakukannya secara sirkuler. Selain itu ada yang bekerja sebagai buruh di sumatera dan berangkat apabila sudah memasuki musim penanaman diwilayah sumatera. Walaupun diantara migrasi yang dilakukan pada musim tertentu dan bahkan harus bertahun-tahun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Setidaknya hasil yang diberikan mampu menambah pendapatan dari sektor pertanian yang dirasa tidak cukup.

**Hubungan Pemanfaatan langsung terhadap struktur nafkah rumahtangga**

Hasil korelasi menunjukkan tidak adanya hubungan hal ini karena pemanfaatan langsung yang dilakukan hanya sebatas pemanfaatan dalam menggunakan lahan, selain itu seperti pemanfaatan kayu tidak diperbolehkan pihak perhutani, karena pohon jati dikhususkan untuk produksi perhutani sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk menjarah tanaman jati tanpa izin perhutani.

Tabel 6 Hubungan pemanfaatan langsung terhadap struktur nafkah rumahtangga

	Tingkat Pendapatan		Tingkat Pengeluaran		<i>Saving capacity</i>	
	<i>Correlation coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<i>Correlation coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<i>Correlation coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Pemanfaatan langsung	0.207	0.264	-0.146	0.398	0.135	0.065

Pemanfaatan langsung yang dilakukan rumahtangga diduga memiliki hubungan terhadap struktur nafkah yang diterapkan oleh rumahtangga. Pemanfaatan langsung dilihat dari bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan yang secara langsung dapat dirasakan oleh penduduk, hal ini dapat berupa hasil hutan kayu maupun non kayu, lahan yang digarap, hasil tanaman yang bisa ditanam di lahan tersebut. sedangkan struktur nafkah masyarakat yang diperoleh dari *on farm*, *off farm*, *non farm* yang membentuk tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan *saving capacity*.

**Hubungan Pemanfaatan Tidak Langsung terhadap Struktur Nafkah**

Pemanfaatan tidak langsung diduga memiliki hubungan terhadap struktur nafkah rumahtangga petani desa sekitar hutan desa Gandong. Pemanfaatan tidak langsung merupakan segala bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan yang secara tidak langsung dapat dirasakan dan dinikmati oleh penduduk, seperti kelestarian hutan, keamanan hutan dan sebagainya.

Hasil korelasi menunjukkan tidak adanya hubungan. Kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan bagi keduanya walaupun menurut kondisi lahan yang telah dikerjasamakan perhutani dan *pesanggem* cukup subur hingga tidak subur dan memerlukan banyak pupuk dalam penanamannya, tetapi mereka masih bisa menikmati hasilnya.

Tabel 7 Hubungan pemanfaatan tidak langsung terhadap struktur nafkah rumahtangga

	Tingkat Pendapatan		Tingkat Pengeluaran		Saving capacity	
	Correlation	Sig. (2-tailed)	Correlation	Sig. (2-tailed)	Correlation	Sig. (2-tailed)
Pemanfaatan tidak langsung	0.178	0.272	0.135	0.408	0.013	0.935

**Hubungan Struktur Nafkah dengan Strategi Nafkah**

Variabel struktur nafkah diduga memiliki hubungan terhadap strategi nafkah yang diterapkan oleh rumahtangga. Struktur nafkah yang terdiri dari

pendapatan yang diperoleh dari *on-farm*, *off farm*, dan *non farm* yang kemudian diperoleh tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran rumahtangga, hingga *saving capacity*. Sedangkan strategi nafkah yang diterapkan masyarakat dibagi menjadi 4 strategi yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, pola nafkah ganda dan migrasi.

Hasil korelasi menunjukkan nilai signifikannya adalah -0,313 dengan arah hubungan negatif dengan kuatnya hubungan cukup. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi berbanding terbalik. Selain itu terdapat hubungan antara *saving capacity* dengan ekstensifikasi pertanian dengan nilai signifikannya adalah 0,350. Arah hubungan yang terjadi bernilai positif dan hubungan keduanya bersifat cukup. sedangkan hubungan antara pendapatan dengan strategi nafkah migrasi yang diterapkan sebesar 0,338. Arah hubungan dari kedua hubungan tersebut sama-sama bernilai positif, selain itu kekuatan hubungan bersifat cukup.

Tabel 8 Hubungan struktur nafkah terhadap strategi nafkah rumahtangga

	Strategi nafkah			
	Intensifikasi pertanian	Ekstensifikasi pertanian	Pola nafkah ganda	Migrasi
Tingkat Pendapatan	0.102	0.225	0.051	0.338*
Tingkat pengeluaran	-0.053	-0.059	0.272	0.078
Saving capacity	-0.313*	0.350*	0.086	0.058

\*correlation is significant at the level 0,05 level (2-tailed).

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Sejak tahun 2005 sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah dilakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Cipto Wono Lestari. Beberapa kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang pertanian seperti pembagian lahan untuk digarap masyarakat, perawatan, pengawasan dan bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak.

Kegiatan kerjasama yang dilakukan melalui sistem PHBM ini masyarakat melakukan pemanfaatan langsung dengan menggarap lahan yang sudah

dibagikan rata kepada anggota lembaga yang siap untuk menggarap, selain itu masyarakat ikut bekerjasama mengawasi tanaman pokok yang ditanam perhutani yaitu pohon jati. Dibawah tegakan pohon jati ini lah masyarakat diperbolehkan menanam tanaman seperti palawija. Selain pemanfaatan langsung, terdapat pemanfaatan tidak langsung yang bisa dirasakan *pesanggem*. Hutan yang tidak gundul dan lestari menunjukkan bahwa perhutani masih bisa panen produksi kayu, hal ini menunjukkan kerjasama yang baik antara *pesanggem* dengan perhutani. Dengan adanya hal tersebut masyarakat masih bisa menanam dilahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumahtangga.

Struktur nafkah rumahtangga *pesanggem* yang diperoleh dari sektor pertanian PHBM, pertanian non PHBM pada setiap golongan berbeda. Pemanfaatan hasil pertanian PHBM terbesar diperoleh oleh golongan pendapatan rendah sebesar 47 persen. Disusul dengan pendapatan yang diperoleh sektor pertanian PHBM golongan tinggi dan sedang sebesar 35 persen. *Pesanggem* yang memiliki pendapatan golongan rendah mengandalkan sektor pertanian dari PHBM untuk kelangsungan kehidupannya. sedangkan *pesanggem* golongan tinggi dan sedang, lebih mengandalkan sektor pertanian non PHBM. *Pesanggem* golongan rendah dan tinggi juga mengandalkan sektor non pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingkat pengeluaran rumahtangga *pesanggem* terbagi menjadi beberapa pengeluaran seperti konsumsi, listrik, pendidikan, transportasi dan air HIPPAM. Pengeluaran tertinggi dikeluarkan oleh *pesanggem* dengan golongan rendah yaitu 33,5 persen untuk kebutuhan konsumsi dan listrik. Kategori pengeluaran yang tinggi ini karena *pesanggem* memiliki pendapatan yang rendah. Untuk *saving capacity* rumahtangga *pesanggem* lebih besar rumahtangga tidak mampu melakukan *saving capacity* karena banyaknya pengeluaran rumahtangga diikuti sedikitnya pendapatan yang diperoleh rumahtangga.

*Pesanggem* juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan diantaranya penerapan strategi nafkah ganda dan migrasi. Sumber pendapatan yang berasal dari non pertanian yang dilakukan rumahtangga *pesanggem* diantaranya menjadi kuli angkut, jual kompos, menjadi PNS, membuka warung, menjadi ahli bekam, pengepul jagung, jual kerupuk nila, menjadi tukang kayu, penjaga gereja, menganyam tas, TKI, bekerja untuk orang lain, tukang kebun di

Lampung, bekerja di Batam dan menjadi kuli bangunan.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan langsung dan tidak langsung yang dapat dirasakan *pesanggem* tidak memiliki hubungan dengan struktur nafkah yang dimiliki rumahtangga. Hasil uji korelasi struktur nafkah terhadap strategi nafkah sebagai berikut intensifikasi pertanian yang berbanding terbalik dengan *saving capacity* berarti jika rumahtangga menerapkan strategi nafkah tersebut maka rumahtangga tidak cukup untuk melakukan *saving*. Sedangkan jika rumahtangga menerapkan ekstensifikasi pertanian maka rumahtangga tersebut cukup untuk melakukan *saving*. Selain itu terdapat hubungan signifikan antara pendapatan dengan strategi nafkah migrasi yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut jika rumahtangga menerapkan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi maka hal ini berhubungan dengan rumahtangga yang menerapkan strategi nafkah migrasi yang dilakukan oleh rumahtangga *pesanggem*.

#### Saran

Hasil penelitian ini memiliki beberapa saran diantaranya: Pemerintah menjadikan kerjasama LMDH Cipto Wono Lestari sebagai contoh kerjasama PHBM yang baik. Kepada Perum Perhutani kerjasama harus ditingkatkan selain melakukan pengawasan dan evaluasi perlu diadakan pelatihan rutin. Kepada ketua LMDH hubungan rekat sesama anggota perlu dilakukan dan melakukan evaluasi bersama anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan. Kepada *pesanggem* meningkatkan partisipasi untuk lebih mendapatkan kebermanfaatn hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adalina Yelin, Nurrochman D R, Darusman D, Sundawati L. 2015. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi alam*. [Internet]. 12(01): 105-118. [Diunduh pada: 2017 Februari 27]. Dapat diunduh dari: <http://ejournal.fordamof.org/latihan/index.php/JPHKA/article/view/1723/1537>
- Arifandy M I, Sihaloho M. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya

- Hutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. [Internet]. 02(03): 147-158. [Diunduh pada: 2017 Maret 02]. Dapat diunduh dari: <http://repository.ipb.ac.id/jspui/handle/123456789/81844?mode=full>
- Avila T, Suyadi B. 2015. Dampak Ekonomi Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. *Jurnal pendidikan Ekonomi*. [Internet]. 09(02): 61-69. [Diunduh pada: 2017 Maret 02]. Dapat diunduh dari: <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/articel/view/3415/2681>
- Awang, et al. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jakarta: Harapan Prima.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Data Statistik Daerah Kabupaten Ngawi 2015. [Internet]. [diunduh pada 2018 Januari 29]. Tersedia pada: <https://drive.google.com/file/d/0B21sWJgIP04gbFZNVtZiBjFBbGM/view>
- [BUMN] Badan Usaha Milik Negara. 2016. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. [internet]. [diunduh pada: 2017 September 12]. Tersedia pada: <http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159>
- [CIFOR] Center for international Forestry Research. 2003. Warta Kebijakan. Perhutanan Sosial [Internet]. [Diunduh pada 2017 September 12]. Tersedia <http://cifor.org/acm/download/pub/wk/warta09.pdf>.
- [CIFOR] Center for international Forestry Research. 2007. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa. [Internet]. [Diunduh pada 2017 Februari 27]. Dapat diunduh pada: [www.cifor.org/PHBM](http://www.cifor.org/PHBM)
- [CIFOR] Center for international Forestry Research. 2009. *Desentralisasi Tata Kelola Hutan:Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*. Cifor:Bogor(ID).
- [CIFOR] Center for international Forestry Research. 2010. Kebijakan Pengelolaan Zona Khusus. [Internet]. [Diunduh pada 2017 Mei 2]. Dapat diunduh pada: [www.cifor.cgiar.org](http://www.cifor.cgiar.org)
- Departemen Kehutanan. (2003). Keputusan Menteri Kehutanan No.175/ kpts-II/2003 Tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dari 40.000 Hektar menjadi 113.357 Hektar.
- Deni. 2014. Akses dan Kontrol Sumberdaya Hutan Gunung Ciremai. [Tesis]. [Internet]. [diunduh pada: 2017 September 12]. Dapat diunduh pada: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69735>
- Dharmawan AH. 2007. Sistem penghidupan dan nafkah pedesaan: pandangan sosiologi nafkah (livelihood sociology) mazhab barat dan mazhab Bogor. *Sodality*. [Internet] 01(02):169-192. [Diunduh pada 2017 Maret 23] Dapat diunduh dari: <http://journalsodality.ipb.ac.id/index.php/component/sodality/?id=86&task=view>
- Djamaludin A. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Effendi S, Tukiran. editor. Jakarta[ID]. LP3ES
- Fridayanti N, Dharmawan A H. (2013). Analisis Struktur dan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Sekitar Kawasan Hutan Konservasi di Desa Cipeunteuy. Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sodality*. [Internet]. 01(01): 26-36. Diunduh pada: 2017 April 4]. Dapat diunduh dari: <http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/9388/7355>
- Fridayanti N. (2013). Analisis Struktur dan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Sekitar Kawasan Hutan Konservasi di Desa Cipeunteuy. Kabupaten

Sukabumi.[Skripsi]. [Internet]. [diunduh pada: 2017 September 12]. Dapat diunduh pada:  
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63159>

Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah). [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Kartasubrata J. 1986. Partisipasi Rakyat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di Jawa. [Disertasi]. [Internet]. [Di unduh pada: 2017 Mei 4]. Dapat diunduh pada:  
<http://respository.ipb.ac.id/handle/123456789/42437>

Mantra I B, Kasto, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Effendi S, Tukiran. editor. Jakarta[ID]. LP3ES

Mugniesyah SG. 2008. *Modul Kuliah Pendidikan Orang dewasa*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Niswah Z K. 2011. Strategi nafkah masyarakat adat kasepuhan sinar resmi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Purnamasari Q, Indrawan A, Muntasib E. K. S. (2005). Kajian Pengembangan Produk Wisata Alam Berbasis Ekologi di Wilayah Wana Wisata Curug Cilember (WWCC), Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. [Internet]:9(01): 14-30. [diunduh pada: 2017 September 12]. Diunduh dari:  
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/31099>

Purnomo A M, (2006). Strategi Nafkah Rumah Tangga Desa sekitar Hutan (Studi Kasus Desa Peserta PHBM di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat). [Thesis]. [Internet]. [Diunduh pada: 2017 Mei 4]. Dapat diunduh dari:  
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/8466>

Ribot, J. C, dan Peluso, N L,. (2003). A Theory of Acces. *Journal of Rural Sociology*, 68(2) Rural Sociological Society. Halaman 153-181

Turasih. 2011. Sistem nafkah rumahtangga petani kentang di Dataran Tinggi Dieng (kasus Desa Karangtengah, Kecamatan

